

Strategi Eufemisasi dalam Wacana Penutupan Program Studi oleh Kemendiktisaintek: Analisis Wacana Kritis Fairclough

Iwan Wahyudi¹, Hasan Busri², Sifa Yunita Sari³

¹²³Magiser Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas, Universitas Islam Malang

¹Iwanyudi522@gmail.com, ²hasan.busri@unisma.ac.id, ³sifayunitasari3@gmail.com

Penulis Korespondensi:

Iwan Wahyudi

Iwanyudi522@gmail.com

Abstrak

Kebijakan penataan dan penutupan program studi (prodi) yang diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepanjang April-Juni 2026 memunculkan pertautan menarik antara bahasa dan kekuasaan dalam wacana kebijakan pendidikan tinggi Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi eufemisasi yang digunakan pejabat Kemendiktisaintek dalam mengonstruksi wacana penutupan prodi, serta menjelaskan cara kerja strategi tersebut pada tataran teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural sebagaimana kerangka analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough. Data penelitian berupa tuturan pejabat Kemendiktisaintek (Sekretaris Jenderal dan Menteri) serta siaran pers resmi yang dipublikasikan media daring nasional pada periode April-Juni 2026, dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan teknik simak-catat dan analisis isi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat strategi eufemisasi utama, yaitu (1) substitusi leksikal, terutama penggantian kata “penutupan” dengan “penataan” dan “transformasi”; (2) pergeseran agensi dan pertanggungjawaban melalui konstruksi pasif serta pelimpahan sumber keputusan kepada “badan penyelenggara”; (3) pelunakan modalitas melalui leksia “opsi terakhir”, “kerelaan hati”, dan penanda ketaktentuan seperti “mungkin”; serta (4) legitimasi melalui wacana kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Pada tataran praktik wacana, teks yang dikaji menunjukkan intertekstualitas dengan wacana developmentalisme dan kekerjaan (*employability*); pada tataran praktik sosiokultural, eufemisasi berfungsi meredam resistansi publik dan akademisi terhadap kebijakan yang berpotensi mengancam otonomi keilmuan dan mata pencaharian sivitas akademika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eufemisasi dalam wacana birokrasi pendidikan tinggi bukan semata gaya berbahasa, melainkan strategi ideologis untuk mengelola penerimaan publik atas kebijakan yang berpotensi kontroversial.

Kata kunci: *eufemisasi; analisis wacana kritis; Fairclough; kebijakan pendidikan tinggi; penutupan program studi*

Abstract

The discourse on the restructuring and closure of study programs promoted by Indonesia's Ministry of Higher Education, Science, and Technology (Kemendiktisaintek) between April and June 2026 offers a compelling case of the relationship between language and power in Indonesian higher-education policy discourse. This study identifies and describes the euphemization strategies employed by Kemendiktisaintek officials in constructing the discourse of study-program closure, and explains how these strategies operate at the level of text, discourse practice, and sociocultural practice within Norman Fairclough's critical discourse analysis (CDA) framework. The data

consist of statements by Kemendiktisaintek officials (the Secretary-General and the Minister) and official press releases published by national online media between April and June 2026, analyzed qualitatively through listening-note-taking and qualitative content-analysis techniques. The findings reveal four main euphemization strategies: (1) lexical substitution, particularly the replacement of "closure" with "restructuring" and "transformation"; (2) agency and accountability shifting through passive constructions and the attribution of decisions to "operating bodies"; (3) modality softening through expressions such as "last option" and "willingness", along with hedges such as "perhaps"; and (4) legitimation through the discourse of industrial needs and national development. At the level of discourse practice, the texts exhibit intertextuality with developmentalist and employability discourses; at the level of sociocultural practice, euphemization functions to mitigate public and academic resistance to a policy perceived as threatening academic autonomy and academic livelihoods. The study concludes that euphemization in higher-education bureaucratic discourse is not merely a stylistic choice but an ideological strategy for managing public acceptance of potentially controversial policy.

Keywords: *euphemization; critical discourse analysis; Fairclough; higher education policy; study program closure*

Pendahuluan

Wacana kebijakan publik tidak pernah lepas dari pilihan bahasa yang digunakan untuk menyampaikannya. Pilihan diksi, struktur kalimat, dan modalitas yang dipakai oleh pejabat negara dalam menyampaikan kebijakan yang berpotensi kontroversial kerap menjadi ruang pertarungan makna antara kepentingan birokrasi dan penerimaan publik (Hajrah et al., 2024). Salah satu fenomena kebahasaan yang menonjol dalam konteks tersebut adalah eufemisasi, yaitu strategi penghalusan makna yang bertujuan mengurangi efek negatif suatu ungkapan sekaligus menjaga citra positif penutur maupun institusi yang diwakilinya.

Fenomena ini tampak jelas dalam wacana penutupan program studi (prodi) yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sejak akhir April 2026 (Aisyah, 2026). Wacana tersebut pertama kali mengemuka ketika Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan rencana penataan dan penutupan sejumlah prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Bali. Pernyataan tersebut menuai pro dan kontra, terutama karena berpotensi berdampak pada program studi rumpun ilmu sosial, humaniora, dan kependidikan yang dinilai mengalami kelebihan pasokan lulusan.

Menariknya, dalam perkembangan wacana selanjutnya, terjadi pergeseran naratif yang signifikan. Kementerian yang semula mewacanakan "penutupan prodi tak relevan" kemudian menegaskan bahwa penutupan bukan kebijakan kementerian, melainkan usulan dari badan penyelenggara perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan bahwa fokus kebijakan sesungguhnya adalah "penataan" serta "pembinaan" program studi (Infonasional, 2026). Pergeseran dari "penutupan" menuju "penataan", dari inisiatif kementerian menuju usulan badan penyelenggara, dan dari kebijakan tetap menuju "opsi terakhir" merupakan indikasi kuat adanya strategi eufemisasi yang layak dikaji secara kritis.

Kajian mengenai eufemisme dalam wacana politik dan kebijakan publik bukan hal baru dalam linguistik Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengungkap penggunaan eufemisme pada pidato kenegaraan, rubrik politik-hukum media massa, maupun pemberitaan kebijakan ekonomi, dan umumnya menyimpulkan bahwa eufemisme berfungsi menyamarkan realitas serta melegitimasi kebijakan di mata publik

(Mulyasari & Sirulhaq, 2020). Namun, kajian yang secara khusus menyasar wacana kebijakan penataan/penutupan program studi di lingkup pendidikan tinggi pascapembentukan Kemendiktisaintek masih sangat terbatas, padahal isu ini menyentuh langsung kepentingan ribuan program studi, dosen, dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi strategi eufemisasi yang digunakan dalam tuturan pejabat dan siaran pers resmi Kemendiktisaintek terkait wacana penutupan program studi; dan (2) menjelaskan bagaimana strategi eufemisasi tersebut bekerja pada tiga dimensi analisis wacana kritis Fairclough, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan teoretis bagi kajian analisis wacana kritis pada ranah kebijakan pendidikan tinggi, sekaligus sumbangan praktis berupa kepekaan kritis masyarakat akademik dalam membaca wacana kebijakan yang disampaikan otoritas pendidikan.

Allan dan Burridge (1991) mengemukakan bahwa eufemisme merupakan ungkapan alternatif yang dipilih penutur untuk menghindari ungkapan yang berpotensi memalukan, menyinggung, atau menimbulkan konotasi negatif, baik bagi penutur, mitra tutur, maupun pihak ketiga. Dalam kerangka tersebut, eufemisme dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu sebagai wujud kesantunan berbahasa dan sebagai strategi penyamaran atau penyembunyian realitas. Fungsi kedua inilah yang paling relevan dalam wacana kebijakan publik, sebab eufemisme tidak sekadar menghaluskan bahasa, tetapi berpotensi mengaburkan konsekuensi riil dari suatu kebijakan agar tidak memicu resistansi publik.

Dalam wacana politik dan birokrasi, eufemisme kerap dijumpai pada ungkapan seperti “penyesuaian harga” untuk kenaikan harga, “perampangan organisasi” untuk pemutusan hubungan kerja, atau “tindakan tegas terukur” untuk represi aparat. Pola serupa ditemukan pula pada teks pidato kenegaraan maupun pemberitaan media arus utama, di mana pilihan leksikal yang netral dipakai untuk membingkai kebijakan agar diterima secara lebih halus oleh khalayak (Sari et al., 2025). Kajian-kajian tersebut secara konsisten menegaskan bahwa eufemisme dalam wacana publik tidak berdiri sendiri sebagai fenomena kebahasaan semata, melainkan terkait erat dengan relasi kekuasaan dan ideologi yang melatari produksi teks.

Norman Fairclough mengembangkan model analisis wacana kritis tiga dimensi yang memandang setiap peristiwa wacana (*discursive event*) sebagai teks, praktik wacana (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*) yang saling terkait. Dimensi teks berkaitan dengan analisis linguistik terhadap kosakata, tata bahasa, kohesi, dan struktur kalimat yang digunakan; dimensi praktik wacana mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks, termasuk relasi intertekstual dan interdiskursif dengan wacana lain; sementara dimensi praktik sosiokultural menyoroti konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas yang membentuk dan dibentuk oleh wacana tersebut (Fairclough, 1995).

Model Fairclough banyak dipakai untuk membongkar bagaimana wacana digunakan sebagai instrumen kekuasaan, misalnya dalam pembentukan citra pejabat publik melalui teks pidato, konstruksi realitas kebijakan pangan melalui pemberitaan media, hingga representasi kekuasaan dalam wacana kenegaraan. Ciri umum kajian tersebut adalah adanya penekanan pada pilihan diksi, modalitas, dan struktur agentif yang secara sistematis menempatkan pihak berwenang sebagai aktor yang otoritatif sekaligus meminimalkan tanggung jawab atas dampak kebijakan yang berpotensi merugikan pihak lain.

Pertautan antara eufemisme dan analisis wacana kritis terletak pada asumsi bahwa pilihan bahasa yang “halus” bukanlah keputusan netral, melainkan keputusan ideologis yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kerangka ini, eufemisasi dipahami sebagai strategi wacana yang bekerja pada tiga tataran sekaligus: pada tataran teks berupa pemilihan leksikal dan struktur gramatikal tertentu; pada tataran praktik wacana berupa cara teks tersebut diproduksi ulang dan disebarluaskan oleh media; dan pada tataran praktik sosiokultural berupa fungsi ideologis eufemisme dalam melanggengkan atau melegitimasi relasi kekuasaan tertentu (Purba, 2024). Kerangka inilah yang digunakan penelitian ini untuk membedah wacana penutupan program studi oleh Kemendiktisaintek.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain analisis wacana kritis model Fairclough (Fairclough, 1992). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur frekuensi maupun distribusi statistik penggunaan eufemisme, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam konteks sosial tertentu.

Data penelitian berupa satuan lingual (kata, frasa, dan kalimat) yang mengandung indikasi eufemisasi, bersumber dari tuturan pejabat Kemendiktisaintek (Sekretaris Jenderal Badri Munir Sukoco dan Menteri Brian Yulianto) serta siaran pers resmi Kemendiktisaintek Nomor 196/Sipers/IV/2026, sebagaimana dikutip dan dipublikasikan oleh media daring nasional (Tempo, Detikcom, CNN Indonesia, Antara, IDXChannel, GoodStats Data, dan Dunia Dosen) pada rentang waktu 23 April hingga 5 Juni 2026. Rentang waktu tersebut dipilih karena mencakup keseluruhan siklus wacana, mulai dari kemunculan isu penutupan prodi, penerbitan siaran pers resmi, hingga klarifikasi dan bantahan kementerian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak dan catat, yaitu menyimak teks berita dan transkrip pernyataan resmi, kemudian mencatat satuan lingual yang berpotensi merupakan strategi eufemisasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang sejalan dengan model tiga dimensi Fairclough: (1) analisis tekstual/mikrostruktural untuk mengidentifikasi pilihan leksikal, struktur kalimat aktif-pasif, dan modalitas; (2) analisis praktik wacana/mesostruktural untuk menelusuri relasi intertekstual dan interdiskursif antarteks serta pola produksi-distribusi wacana melalui media; dan (3) analisis praktik sosiokultural/makrostruktural untuk mengaitkan temuan tekstual dengan konteks kebijakan pendidikan tinggi, kepentingan ekonomi-politik, serta respons publik dan akademisi. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pemberitaan dari beberapa media untuk memastikan konsistensi kutipan pernyataan pejabat yang dianalisis.

Hasil

Analisis terhadap korpus data menemukan empat strategi eufemisasi yang digunakan secara konsisten dalam wacana penutupan program studi oleh Kemendiktisaintek, yaitu substitusi leksikal, pergeseran agensi dan pertanggungjawaban, pelunakan modalitas, serta legitimasi melalui wacana kebutuhan industri dan pembangunan. Keempat strategi tersebut dibahas berikut, disertai penjelasan pada tataran praktik wacana dan praktik sosiokultural.

Dimensi Teks: Strategi Eufemisasi Leksikal

Strategi eufemisasi paling menonjol dalam korpus data adalah substitusi leksikal, yaitu penggantian kata “penutupan” yang berkonotasi negatif (kehilangan, pemberhentian, kerugian) dengan kata “penataan” dan “transformasi” yang berkonotasi netral, bahkan positif (perbaikan, penyesuaian, kemajuan). Pergeseran ini tampak jelas ketika siaran pers resmi Kemendiktisaintek Nomor 196/Sipers/IV/2026 mendefinisikan kembali agenda kementerian bukan sebagai penutupan, melainkan sebagai proses transformasi program studi yang terukur, komprehensif, dan berbasis kajian menyeluruh untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional.

Pola serupa terlihat pada pernyataan Menteri Brian Yulianto yang secara eksplisit menyangkal bahwa penutupan prodi merupakan kebijakan kementerian, dan memilih membingkainya sebagai “pembinaan dan pengembangan” prodi, misalnya transformasi program studi matematika menjadi aktuaria atau teknik elektro menjadi kecerdasan buatan. Di sini, kata kunci “ditutup” digantikan dengan penekanan pada perubahan “substansi” keilmuan, sehingga secara leksikal peristiwa penutupan disamarkan menjadi peristiwa pengembangan.

Dari perspektif Allan dan Burridge, pola ini merupakan eufemisme jenis concealment, yaitu penyamaran realitas yang secara substansial tetap melibatkan penghentian operasional suatu program studi, namun disajikan melalui leksia yang menonjolkan aspek perbaikan dan pertumbuhan. Efek dari pilihan leksikal ini adalah tereduksinya asosiasi negatif seperti kehilangan pekerjaan dosen atau hilangnya akses studi bagi calon mahasiswa yang sesungguhnya melekat pada peristiwa penutupan program studi.

Dimensi Teks: Pergeseran Agensi dan Pertanggungjawaban

Strategi kedua yang ditemukan adalah pergeseran agensi (agency shifting), yaitu pengalihan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan penutupan dari kementerian kepada pihak lain. Hal ini tampak paling jelas pada pernyataan Menteri Brian Yulianto dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, yang menegaskan bahwa 122 program studi yang telah ditutup sepanjang 2026 merupakan hasil usulan dari badan penyelenggara, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, bukan inisiatif atau kebijakan kementerian.

Secara gramatikal, pergeseran ini juga tampak pada penggunaan konstruksi pasif dan nominalisasi yang mengaburkan pelaku tindakan. Frasa seperti “telah dilakukan penutupan 122 program studi” menempatkan peristiwa penutupan sebagai proses yang terjadi tanpa agen yang jelas, alih-alih menyatakan secara aktif siapa yang menutup dan atas dasar keputusan siapa. Konstruksi semacam ini secara sistematis mengaburkan rantai tanggung jawab: keputusan akhir formal berada di tangan kementerian melalui mekanisme perizinan, namun narasi yang dibangun menempatkan badan penyelenggara sebagai pihak yang “mengusulkan”, sehingga kementerian tampak sebagai pihak yang pasif merespons, bukan pihak yang menginisiasi.

Pergeseran agensi ini penting dibaca sebagai strategi eufemisasi karena ia tidak menyamarkan kata, melainkan menyamarkan struktur tanggung jawab. Ketika kritik publik mengarah pada dampak kebijakan penataan prodi misalnya potensi hilangnya program studi rumpun ilmu sosial dan kependidikan kementerian dapat berlindung di balik narasi bahwa keputusan tersebut berasal dari “kerelaan” dan “usulan” perguruan tinggi sendiri, bukan paksaan dari pusat.

Dimensi Teks: Pelunakan Modalitas

Strategi ketiga adalah pelunakan modalitas melalui pemilihan verba modal dan adverbial yang menurunkan tingkat keterikatan penutur terhadap proposisi yang disampaikan. Ungkapan “penutupan program studi bukanlah pilihan utama” dan “penutupan hanya menjadi opsi terakhir”, misalnya, menempatkan penutupan sebagai kemungkinan yang jauh dan bersyarat, bukan agenda yang pasti dan segera. Demikian pula ungkapan Sekretaris Jenderal Badri Munir Sukoco yang meminta perguruan tinggi memiliki “kerelaan hati” untuk menyeleksi prodi yang perlu ditutup, serta pernyataan “nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama”.

Penanda ketaktentuan seperti “mungkin”, “kalau perlu”, dan “nanti” berfungsi ganda dalam wacana ini. Di satu sisi, penanda tersebut secara linguistik melunakkan daya ilokusi pernyataan sehingga terkesan sebagai wacana yang masih terbuka untuk didiskusikan, bukan keputusan final yang memaksa. Di sisi lain, penanda yang sama juga memberi ruang gerak politis bagi kementerian: jika publik memberi resistansi kuat, kementerian dapat menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanya “wacana” atau “kemungkinan”, sebagaimana tampak pada klarifikasi berulang yang menyatakan bahwa penutupan prodi “tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan Kemendiknasaintek”.

Dimensi Teks: Legitimasi melalui Wacana Kebutuhan Industri

Strategi keempat adalah legitimasi kebijakan melalui argumen kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Pernyataan bahwa jurusan keguruan meluluskan sekitar 490.000 sarjana per tahun sementara kebutuhan guru hanya 20.000 orang, misalnya, dipakai sebagai justifikasi kuantitatif yang seolah objektif dan bebas nilai, padahal penempatan angka tersebut dalam wacana berfungsi membenarkan penataan/penutupan prodi rumpun kependidikan dan ilmu sosial-humaniora. Legitimasi semacam ini diperkuat dengan rujukan pada delapan sektor industri strategis energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju yang diposisikan sebagai arah pembangunan nasional yang harus diikuti oleh dunia pendidikan tinggi.

Menariknya, kementerian juga menyisipkan jaminan bahwa “bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan akan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional”. Pernyataan ini berfungsi sebagai strategi mitigasi wacana (*face-saving*) yang meredam kekhawatiran rumpun ilmu yang paling rentan terdampak kebijakan, tanpa mengubah substansi arah kebijakan itu sendiri.

Dimensi Praktik Wacana: Intertekstualitas dan Reproduksi Media

Pada tataran praktik wacana, teks-teks yang dianalisis menunjukkan pola intertekstualitas dan interdiskursivitas yang kuat dengan wacana developmentalisme dan employability (kebekerjaan) yang lazim dipakai dalam wacana kebijakan pendidikan sejak beberapa tahun terakhir, misalnya rujukan pada “relevansi dengan kebutuhan industri”, “bonus demografi”, dan “kesenjangan lulusan-kebutuhan kerja”. Wacana tersebut secara implisit memposisikan perguruan tinggi terutama sebagai instrumen penyedia tenaga kerja bagi industri, bukan sebagai ruang produksi pengetahuan yang otonom.

Proses produksi wacana juga menunjukkan pola bertahap yang khas birokrasi: pernyataan awal yang relatif terbuka dan tegas dari Sekretaris Jenderal dalam forum simposium, diikuti siaran pers resmi yang memperhalus dan mereformulasi pernyataan tersebut, dan diakhiri klarifikasi Menteri dalam forum resmi kenegaraan (rapat kerja DPR) yang cenderung defensif dan menyangkal. Pola tiga tahap ini pernyataan,

reformulasi, penyangkalan memperlihatkan bagaimana wacana birokrasi beradaptasi terhadap tekanan publik: semakin luas resistansi yang muncul di media, semakin eufemistik dan defensif pula formulasi kebijakan yang disampaikan selanjutnya.

Media daring turut berperan dalam mereproduksi sekaligus mengontraskan wacana resmi tersebut dengan suara kritis dari luar kementerian. Pengamat pendidikan Indra Charismiadi, misalnya, mempertanyakan metodologi penentuan prodi yang layak ditutup dan mengingatkan risiko kebijakan yang tidak berlandaskan kajian akademik yang transparan. Kehadiran kutipan kritis semacam ini dalam pemberitaan menunjukkan bahwa ruang media bukan sekadar corong pasif kementerian, melainkan arena kontestasi makna antara wacana resmi yang eufemistik dan wacana tandingan yang lebih terus terang menyebut risiko kebijakan tersebut.

Dimensi Praktik Sosiokultural: Fungsi Ideologis Eufemisasi

Pada tataran praktik sosiokultural, eufemisasi dalam wacana penutupan program studi perlu dibaca dalam konteks relasi kekuasaan yang lebih luas antara negara, perguruan tinggi, dan pasar kerja. Kebijakan penataan/penutupan prodi merupakan bagian dari agenda besar penyelarasan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industrialisasi nasional, sebuah orientasi kebijakan yang berpotensi bersinggungan dengan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, terutama bagi rumpun ilmu yang tidak secara langsung terserap oleh pasar kerja industri, seperti ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan.

Dalam konteks ini, eufemisasi berfungsi sebagai instrumen pengelolaan penerimaan publik (*public acceptance management*). Dengan mengganti “penutupan” menjadi “penataan”, memindahkan tanggung jawab kepada “badan penyelenggara”, dan menempatkan penutupan sebagai “opsi terakhir” yang bersyarat, kementerian dapat terus menjalankan agenda restrukturisasi program studi tanpa harus menanggung beban politis penuh atas dampak sosial yang ditimbulkannya termasuk potensi kehilangan pekerjaan bagi dosen dan berkurangnya akses pendidikan tinggi di sejumlah bidang ilmu tertentu.

Temuan ini sejalan dengan kajian-kajian terdahulu mengenai eufemisme dalam wacana politik Indonesia, yang menegaskan bahwa eufemisme dipakai untuk menyamarkan realitas dan mereduksi resistensi publik, sekaligus membingkai persepsi guna melegitimasi kebijakan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan kekhasan tersendiri pada ranah kebijakan pendidikan tinggi, yaitu adanya pola penyangkalan berulang yang menjadikan seluruh wacana penutupan prodi sebagai sesuatu yang secara resmi “tidak pernah ada” sebagai kebijakan, meskipun secara faktual 122 program studi telah ditutup sepanjang tahun 2026. Ketegangan antara fakta administratif dan narasi resmi inilah yang menjadi inti persoalan ideologis dari eufemisasi yang dikaji dalam penelitian ini.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana penutupan program studi oleh Kemendikisaintek pada periode April-Juni 2026 dibangun melalui empat strategi eufemisasi yang saling menguatkan, yaitu substitusi leksikal (penutupan menjadi penataan/transformatasi), pergeseran agensi dan pertanggungjawaban (dari kementerian kepada badan penyelenggara), pelunakan modalitas (opsi terakhir, kerelaan hati, penanda ketaktentuan), dan legitimasi melalui wacana kebutuhan industri serta pembangunan nasional. Pada tataran praktik wacana, strategi tersebut terpola dalam siklus pernyataan–reformulasi–penyangkalan yang direproduksi media, sekaligus dikontraskan dengan suara kritis dari pengamat pendidikan. Pada tataran praktik

sosiokultural, eufemisasi berfungsi sebagai instrumen ideologis untuk mengelola penerimaan publik atas kebijakan restrukturisasi pendidikan tinggi yang berpotensi mengancam otonomi keilmuan dan mata pencaharian sivitas akademika, sekaligus menegosiasikan ketegangan antara fakta administratif penutupan 122 program studi dan narasi resmi yang menyangkal adanya kebijakan penutupan tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang berasal dari pemberitaan media daring, bukan dokumen kebijakan primer secara utuh, serta rentang waktu pengamatan yang relatif singkat. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas data pada dokumen regulasi resmi (peraturan menteri atau surat edaran) serta membandingkan wacana eufemisasi Kemendiktisaintek dengan respons wacana dari pihak perguruan tinggi dan asosiasi dosen, guna memperoleh gambaran kontestasi wacana yang lebih utuh.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2026, Mei 6). Ketentuan tutup prodi kampus-kampus Indonesia, universitas juga punya regulasi. Detikcom. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8464967/ketentuan-tutup-prodi-kampus-kampus-indonesia-universitas-juga-punya-regulasi>
- Allan, K., & Burridge, K. (1991). *Euphemism and dysphemism: Language used as shield and weapon*. Oxford University Press.
- Dunia Dosen. (2026, Mei 7). Wacana penutupan program studi oleh Kemendiktisaintek. <https://duniadosen.com/informasi/wacana-penutupan-program-studi-oleh-kemendiktisaintek/>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman Group Limited.
- GEBRAK.ID. (2026, Juni 3). Mengejutkan! 122 prodi ditutup sepanjang 2026, Kemdiktisaintek pastikan tak ada jurusan pendidikan. <https://www.gebrak.id/2026/06/mengejutkan-122-prodi-ditutup-sepanjang.html>
- GoodStats Data. (2026, Juni 5). Top 8 prodi yang diusulkan ditutup pada 2026, ada apa saja? <https://data.goodstats.id/statistic/top-8-prodi-yang-diusulkan-ditutup-pada-2026-ada-apa-saja-yLofn>
- Hajrah, H., Jufri, J., & Dalle, A. (2024). Representasi kekuasaan dalam teks pidato Presiden Joko Widodo: AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(3), 2472–2483. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i3.3858>
- IDXChannel. (2026, Juni 2). Sejumlah program studi perguruan tinggi ditutup, begini penjelasan Mendiktisaintek. <https://www.idxchannel.com/news/sejumlah-program-studi-perguruan-tinggi-ditutup-begini-penjelasan-mendiktisaintek>
- Infobanknews. (2026, April 27). Kemendiktisaintek akan tutup prodi tak relevan, keguruan masuk radar. <https://infobanknews.com/kemendiktisaintek-akan-tutup-prodi-tak-relevan-keguruan-masuk-radar>
- Infonasional. (2026, April 27). Kemendiktisaintek berencana tutup program studi tidak relevan. <https://www.infonasional.com/kemendiktisaintek-tutup-prodi-tidak-relevan>
- Kemendiktisaintek. (2026). Siaran pers Nomor 196/Sipers/IV/2026 tentang penataan program studi.

- Mulyasari, T., & Sirulhaq, A. (2020). Penggunaan eufemisme dalam harian Kompas rubrik politik dan hukum. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 3, 80–88.
- Purba, A. (2024). Analisis wacana kritis Fairclough dalam teks iklan Sprite 2024. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 2185–2191.
- Sari, W. P., Setyonegoro, A., & Priyanto. (2025). Analisis wacana kritis Norman Fairclough pada pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia di media Antaranews.com. *Jurnal Pendidikan Bahasa*.
- Tempo. (2026a, April 25). Kemendikti akan tutup prodi yang tak relevan dengan industri. <https://www.tempo.co/politik/kemendikti-akan-tutup-prodi-yang-tak-relevan-dengan-industri-2131624>
- Tempo. (2026b, April 28). Penjelasan Kemendikti soal wacana penutupan prodi. <https://www.tempo.co/politik/penjelasan-kemendikti-soal-wacana-penutupan-prodi-2132180>
- Yulianti, C. (2026). *Kemdiktisaintek bakal tutup sejumlah prodi tak relevan, pakar soroti risiko*. Detikcom.